

HUMANISASI-INKLUSIFISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME

Oleh: Sholahuddin*

Abstract

After the fall of Soeharto regime, educational academic discourses colored by the humanization and pluralistic system. The pluralistic and humanization educational system are necessary to enhance the democratic state and empower civil society from state intervention. In this case, Islamic educational system should be grow and changed from the normative and emphasize on the transferring knowledge from teacher to student to more than that. The participation of student in terms of Islamic educational system is the new construction of that. With student's participation the relationship between teacher and student become more egaliter and equal. This paper tries to criticize Islamic educational system within the Islamic institution like, Madrasah, Pesantren and many others. Actually the writer will emphasize how to apply humanistic values in the sense of Islamic educational system, such us, inclusivism, tolerance, trust and many others. Finally, the writer emphasizes the important of inter-religious education in term of Islamic education.

الحوار حول مفهوم التربية الإسلامية بعد سقوط حكومة سوهارتو تشير إلى أهمية تأسيس نظم التربية التعددية والإنسانية التي تدعم النظام الديمقراطي وتشكيل المجتمع المدني وحمايتها من توسع تدخل الدولة. والنظام الجديد التي تتصف بالإنسانية والتعددية تعطي فرصة أكثر لمشاركة الطلاب أثناء الدراسة حتى أنماط العلاقة بين المدرس والطلاب تشكل مساواة أكثر وتوازنا. وتأسيسا على هذا انتقد الباحث واقعية التربية الإسلامية التي تعمل بها الآن في المدارس المنتظمة والمعاهد التقليدية. والمقاربة التي استخدمها الباحث هو منهج القيم الإنسانية والانفتاحية والتسامح والأمانة في نطاق النظام التربوي.

Kata kunci: pendidikan Islam, visi humanis, pluralisme.

* Penulis adalah mahasiswa Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Sekjen RELIEF (Religious Issues Forum), Santri *Thabaqab Tsalitsab* Ma'had Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Salah satu kesulitan besar yang dihadapi oleh kelompok-kelompok dialog antar iman atau antar agama (*inter-religious and interfaith dialogue*) dalam menyebarkan nilai-nilai multikulturalisme dan inklusifisme adalah tingginya resistensi massa terhadap isu dan wacana tentang pluralisme, multikulturalisme dan inklusifisme. Selalu ada semacam “tembok penghalang” dalam kognisi umat untuk beranjak dari paradigma eksklusifis, paradigma yang mendaku keselamatan (*the salvation*) hanya ada pada diri umat beragama yang bersangkutan.

Seorang eksklusifis berusaha untuk memonopoli kebenaran dan tidak membagikannya kepada pemeluk agama yang lain. Biasanya, mereka merasa mempunyai hak veto untuk menentukan mana agama yang benar dan salah. Dalam internal umat beragama sendiri, seorang eksklusifis merasa dirinyalah yang mempunyai otoritas untuk menentukan bahwa seseorang menyimpang atau tidak, masuk surga atau neraka. Alhasil mereka mempunyai pola dan gaya keberagamaan yang otoriter dan tidak memberi peluang kepada yang lain untuk merengkuh kebenaran.

Sikap saling mencurigai, saling membenci, saling memusuhi antar umat beragama sedikit banyak disumbangkan oleh eksklusivitas teologis, meskipun faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik juga ikut berkontribusi adanya konflik. Jelas sekali bahwa sikap eksklusif sangat mengganggu hubungan harmonis antar umat beragama dan dapat merusak tatanan sosial-politik dalam negara ini. Ketika agama digunakan untuk kepentingan politik maka dampak dari sikap saling mencurigai, membenci dan memusuhi ikut memperburuk keadaan yang chaos sebagaimana tersebut.¹

Pendidikan agama (kurikulum) yang selama ini diajarkan di sekolah, pesantren, madrasah dan institusi Islam lainnya turut memberikan kontribusi ossifikasi eksklusivisme dalam Islam. Dalam filsafat ilmu, apa yang ada dalam sistem pendidikan Islam di tanah air belum mengalami *paradigm shifted* (perubahan bandul paradigma) dari normativitas menjadi kontruksi bangunan kurikulum yang lebih inklusif, pluralis dan afirmatif terhadap berbagai isu global. Pendidikan Islam masih berkuat pada *normal science* dan belum bisa mencetuskan letupan-letupan ilmu pengetahuan baru.

Pendidikan agama sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tanggung jawab (*moral obligation*) dalam penyebaran nilai-nilai pluralisme, multikulturalisme, inklusivisme dan toleransi. Dalam konteks normativitas pendidikan Islam sebagaimana di atas, maka sangat perlu diperkenalkannya kurikulum yang juga mengantarkan para peserta didik untuk lebih memahami Islam

¹ Kautzar Azhari Nor (2000), “Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama” dalam Th. Sumarthana (ed) *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, p. 231.

tidak hanya dari perspektif normatif dan konvensional tetapi juga historis dan kontekstual. Pemahaman tentang Islam yang kontekstual, dan berangkat dari pengalaman empirik kemanusiaan bisa merupakan keniscayaan di mana gempa tektonik informasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh umat manusia.

Kajian kritis mengenai pendidikan Islam harus bertumpu pada fakta historis yang benar-benar riil dan terjadi dalam masyarakat. Pendidikan Islam yang melulu normatif dan konvensional perlu untuk direkonstruksi agar lebih *up to date* dan tidak ketinggalan jaman.

B. Dua Tipologi

Ada dua tipologi dalam keberagaman muslim di Indonesia, yaitu²:

1) *Exclusive Moslem*

Kosakata ini dipergunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu dalam umat Islam yang tampak begitu semangat menerapkan penafsiran secara literal dan *scriptural* terhadap al-Qur'an atau Sunnah. Mereka biasanya menafikan ijtihad sebagai sebuah metode untuk menggali hukum dari sumber primernya. Kelompok ini menganggap bahwa teks merupakan solusi bagi segala problem kemanusiaan dan oleh karena itu mereka menempatkan teks sebagai sesuatu yang "*supreme*". Di samping itu, para eksklusif juga mendaku kebenaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang beragama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Mereka menganggap yang berlainan agama sebagai domba-domba tersesat yang perlu diselamatkan. Dalam kadar-kadar tertentu derajat toleransi mereka tidak meningkat.

Ketidaktoleransian antara para eksklusif Islam menjadikan mereka kelihatan sangat reaktif dan menebar kebencian di mana-mana. Hal ini setidaknya dapat ditemukan dari bagaimana mereka bereaksi terhadap segala tatanan dan nilai yang dianggap tidak sesuai dan layak dengan apa yang mereka praktekkan selama ini. Menurut hemat penulis, pendidikan Islam yang eksklusif dan menebarkan kebencian dari prespektif teologis juga memberikan kontribusi ketiadaan toleransi di antara mereka.

Mereka juga mempercayai penyatuan antara agama dan negara (*unity between religion and state*). Bagi mereka Islam adalah *ad-din wa ad-dawlah* (agama dan negara). Dalam konteks Indonesia, seorang muslim eksklusif akan selalu getol memperjuangkan syari'ah Islam. Selama era reformasi, mereka giat memproklamirkan ide-ide tentang syari'ah Islam kedalam ruang publik (*public sphere*). Dalam arena politik, kita menemukan bagaimana mayoritas muslim

² Dalam konteks tulisan ini, penulis mengacu kepada pembagian yang ada dalam disertasi Fathimah Hussein, Dosen Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).

eksklusif sangat getol menawarkan *Islamic law*.

2) *Inclusive Moslem*

Secara global apa yang menjadi identitas muslim inklusif berkebalikan dengan identitas dan ciri muslim eksklusif sebagaimana penulis elaborasikan di atas. Muslim inklusif menginterpretasikan al-Qur'an dan Sunnah dengan spirit kontekstual. Dalam hal ini, mereka mengakui fungsi ijtihad di tengah-tengah masyarakat yang kian memuai dan berkembang. Dalam konteks kemajemukan agama-agama, mereka meyakini bahwa Islam adalah agama terbaik bagi mereka, tetapi masih menyisakan ruang bagi penganut agama lain untuk mendapatkan keselamatan.

Dalam konteks kehidupan sosial-politik, seorang muslim inklusif mengafirmasi bentuk negara Indonesia lainnya yang sekarang ini. Mereka menilai bahwa Pancasila mampu menjamin pluraitas dan kemajemukan agama, budaya, suku, etnis, adat istiadat dan lain sebagainya. Mayoritas muslim inklusif akan menentang negara Islam, atau kekhalifahan Islam (*khilafah Islamiyyah*) sebagaimana ditawarkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Penerapan syari'ah Islam yang selama ini getol disuarakan oleh beberapa organisasi Islam pasca reformasi tidak akan mendapatkan simpati dari barisan muslim inklusif. Apalagi NU dan Muhammadiyah sebagai agen perubahan sosial umat Islam di Indonesia dan representasi dari umat Islam moderat telah menolak usulan mereka di parlemen. Muslim inklusif tidak sebagaimana seorang pluralis yang menganggap semua agama "sama" namun mereka tetap mempercayai bahwa Islam adalah agama paling benar sembari membuka hati akan adanya kebenaran dalam agama-agama lain. Muslim pluralis melangkah lebih jauh dengan melakukan "*passing over*" terhadap agama dan kepercayaan lain. Mereka juga menyuarakan akan pentingnya ijtihad sebagai ruh dan energi dalam beragama. Ijtihad adalah ruh yang menghidupkan Islam secara terus-menerus. Tanpa ijtihad seperti diteladankan Umar bin Khattab dan lain-lain, Islam sudah menjadi peti hampa dan artefak kuno yang hanya layak menjadi tontonan dan bukan tuntunan. Untung saja para ulama aktif mengurus akal-budi dan berijtihad untuk mengatasi problem-problem zamannya. Nabi Muhammad sendiri sesungguhnya seorang *mujtahid* ulung. Di tangan Nabi, al-Quran menjadi lentur dan lincah memecahkan sejumlah kebuntuan sosial, politik, dan bahkan ekonomi. Nabi menjadikan al-Quran terlibat dalam proses perubahan sosial, bukan sebagai kitab suci yang menggelayut di awang-awang tanpa bersambung dengan bumi. Al-Quran bukan hanya sekumpulan kidung wahyu yang terlepas dari konteks, melainkan sebuah kerja ijtihad itu sendiri. Hanya para pendukung *status quo* saja yang menolak keniscayaan ini. Demikian ungkapan Jalaluddin al-Suyuthi dalam bukunya *al-Ijtihâd: al-Radd `alâ man Akhlada wa Jabila `anna al-Ijtihâd fi*

Kulli `Ashrin Fardhun.

C. Fenomena Pendidikan Agama di Era Pluralisme

Banyak program dialog antar agama atau antar iman (*inter-religious and inter-faith dialogue*) yang dilakukan pasca reformasi dan kejatuhan rezim Orde Baru, baik yang disponsori oleh negara laiknya Departemen Agama, ataupun yang disponsori oleh LSM, NGO dan beberapa tokoh dalam masyarakat. Program dialog yang disponsori oleh pemerintah misalnya dirasakan sangat elitis dan tidak diikutsertakannya guru agama dalam proses dialog. Barangkali mereka dianggap tidak terlalu penting untuk diajak duduk bersama-sama untuk mendiskusikan pluralitas agama, dianggap tidak terlalu mempunyai posisi strategis dalam mensosialisasikan ide-ide baru.

Padahal guru agama sebagai ujung tombak pendidikan agama nyaris tidak tersentuh oleh gelombang diskursus dialog antar umat beragama dan pluralitas pemikiran keagamaan.³ Dialog antar iman sangat elitis dan terbatas sekali dalam lingkaran elit dan pemuka organisasi sosial keagamaan. Sehingga implikasinya hanya nampak pada *surface structure of community* (bagian luar masyarakat) dan belum sampai pada *the essence* (substansi). Dialog selama ini tidak diarahkan pada massa awam agar mereka mampu menerima pluralitas agama. Pantas jika kerusuhan-kerusuhan berbau SARA eskalasinya bertambah, karena proses politik yang semakin demokratis sementara masyarakat tidak *well educated* untuk merespon berbagai perbedaan dalam bingkai pluralitas.

Karena ketidakikutsertaan guru agama sebagaimana di atas, mereka tetap memegang pemikiran dan *mindset* sebagaimana biasa, yaitu mengajar agama dengan materi, metode dan cara yang sama dengan asumsi dasar, pra anggapan dan kategori yang menyatakan bahwa anak didik seolah-olah masih hidup dalam era homogenitas, bukannya heterogen secara keagamaan sebagaimana yang kita alami, di sini dan saat ini.

Sebetulnya pendidikan agama memiliki signifikansi dan kontribusi yang cukup penting dalam "*civic education*", karena di era multikulturalisme sebagaimana sekarang, kita membutuhkan pendidikan multikultural yang menekankan kesadaran akan pluralitas agama dan kebenaran. Pendidikan agama yang apologetik, reaktif dan tidak afirmatif terhadap umat beragama akan menjadi bumerang bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan hal ini, penting untuk digarisbawahi bagaimana fungsi institusi pendidikan Islam mendudukan dirinya di tengah pluralitas nilai dan norma kerohanian masyarakat. Dalam hal ini anak didik harus dididik untuk bersikap saling menghargai identitas agama-agama dan kepercayaan apapun yang ada.

³ Amin Abdullah (2000), *Pengajaran Kalam dan Teologi dalam Era Kemajemukan di Indonesia: Sebuah tinjauan Materi dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 251.

Kekhawatiran dan kemasygulan beberapa kalangan bahwa pendidikan multikultural akan mendegradasi keimanan dan tidak sesuai dengan tuntunan fundamental dalam Islam (*ushul al-addin*) adalah kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena dalam konteks pendidikan multikulturalisme ini, peserta didik tidak diajarkan untuk menihilkan semua nilai dan bahkan merelatifisasinya melainkan tetap untuk mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling benar sembari tidak menutup kemungkinan adanya kebenaran lain di luar Islam. Salah satu tujuan dari pendidikan multikultural adalah pendidikan Islam yang tidak menjurus pada *truth claim*.

Pendidikan multikultural berusaha menanamkan pada anak didik pentingnya beragama secara kualitas dan bukan kuantitas. Mereka diajarkan bagaimana mengedepankan substansi dari pada simbol-simbol keagamaan. Pesan-pesan universal agama seperti keadilan, kejujuran, dan toleransi. Semuanya merupakan nilai-nilai yang perlu untuk dikembangkan dalam masyarakat plural. Setidaknya peran aktif yang dapat dikerjakan oleh para aktifis pendidikan adalah mengembangkan desain kurikulum dan metode pendidikan agama yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai antar pemeluk agama dan kepercayaan. Di sinilah pentingnya pendidikan agama lintas kepercayaan (*inter-religious education*).

Mata pelajaran perbandingan agama (*comparative religious studies*) perlu diajarkan di bangku SMA, sehingga menumbuhkan pemahaman dan toleransi antar anak didik. Dalam hal ini, kita agaknya perlu mengkaji pemikiran para tokoh komunitarian seperti Charles Taylor (*the politics of recognition*), Alisdair MacIntyre (*after virtue*), Michael Sandel (*liberalism and the limits of justice*), maupun Michael Wilzer (*spheres of justice*). Pentingnya penekanan mereka pada integritas moral pribadi (*clear moral self*), penghargaan identitas (*identity recognition*), pendidikan agama yang lintas kepercayaan (*inter-religious education*), toleransi dan respek akan perbedaan (*tolerance and respect for difference*) serta penghargaan terhadap tradisi (*valuing tradition*) merupakan nilai-nilai moral utama yang diperlukan guna mendidik anak-anak di era milenium ini.⁴

D. Penutup

Meski dengan agak melakukan penyederhanaan di sana-sini tetapi satu hal yang perlu untuk senantiasa diingatkan dalam konteks humanisasi-inklusifisasi pendidikan Islam yaitu:

1. Demokrasi pendidikan Islam, yaitu adanya kesetaraan antar subjek pendidikan atau *stake holder* pendidikan. Indonesia sejak tahun 1997, memasuki "*a transition period towards a democratic society*."⁵ Pada era ini, hubungan antara pendidikan dan

⁴ Ratno Lukito (2002), "Undang-Undang Agama dan Civic Education", dalam *Kompas*, Jum'at 22 Agustus p. 3.

⁵ H.A.R Tilaar (2003), *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesia-Tera, p. xvii.

kekuasaan mulai muncul dan berkembang dalam suasana kesetaraan. Kasus “pelurusan” mata pelajaran sejarah atau pengevaluasian mata pelajaran PPKn, merupakan salah satu cermin adanya pembersihan *hegemonik* kekuasaan penguasa dalam dunia pendidikan. Transisi demokrasi ini, diharapkan menjadi titik balik reorientasi pendidikan Islam ke visi “Indonesia Baru”, yaitu masyarakat sejahtera dan demokratik. Lebih-lebih pendidikan agama (Islam) harus mengikuti arus yang sudah menjadi *sumnatullah* (hukum alam) itu. Pendidikan agama tidak boleh berdiri sendiri dan merasa eksklusif serta mencukupkan diri dengan pencapaian-pencapaian yang selama ini telah dicapai sebagai pelindung dan penanam moralitas *adilubung* terhadap anak didik. Tetapi pendidikan Islam seharusnya juga terpenggil untuk membekali anak didiknya nilai-nilai toleransi, multikulturalisme dan pluralisme. Karena nilai-nilai lama yang dipegang generasi terdahulu harus dimodifikasi maka ummat Islam harus mengadopsi nilai-nilai baru itu.

2. Pendidikan sebagai sebuah proses humanisasi perlu mengembangkan budaya pembebasan ekspresi dan ruang untuk memilih bagi setiap warga negara. Dalam konteks pendidikan Islam, seorang pendidik seharusnya mampu memberikan kebebasan berekspresi dan ruang untuk memilih kepada anak didiknya. Pola atau metodologi pendidikan Islam yang doktriner dan otoriter harus segera diakhiri. Karena pola demikian tidak afirmatif lagi dengan spirit dan perkembangan zaman yang semakin maju dan progresif ini. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa pendidikan Islam merupakan hak peserta didik dan orang tua. Oleh karena itu, doktrin yang berlebihan hanya akan melahirkan proses pembodohan dan “penjinakan” anak didik oleh kepentingan segelintir elite agama.
3. Untuk memulai kearah humanisasi pendidikan Islam satu hal yang harus diwujudkan adalah perombakan terhadap wacana teologis kita. Wacana teologis yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama lainnya madrasah, pesantren, surau dan lain sebagainya masih menekankan eksklusifisme dan “*truth claim*” sehingga menghasilkan *out put* pribadi-pribadi yang tidak toleran dan kurang apresiatif terhadap keberadaan orang lain. Eksklusifitas memang tidak dapat dihindarkan dari agama-agama, karena dengan energi eksklusifisme itulah agama-agama menghidupi para penganutnya. Tetapi hendaknya diingat pula bahwa eksklusifisme “*over dosis*” tidak harus dipamerkan pada orang lain. Eksklusifisme seharusnya diarahkan ke dalam (internal umat beragama) yaitu dengan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik (*fasthabiqul khairaat*).
4. Perlunya kajian-kajian kritis mengenai intervensi kekuasaan atau intervensi ideologi dalam sistem pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan, merupakan perangkat pendidikan yang kerap dijadikan ruang intervensi kekuasaan *transmitif* (*legitimatif*), yaitu pelanggaran ideologi terhadap rakyat atau peserta didik. Dominasi kekuasaan terhadap dunia pendidikan. Proses pendidikan Islam dalam

suasana seperti ini lebih kental budaya doktrin-mendoktrin, *top down*, dan politik penguasa sebagai penyetir dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan lebih kental diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok elit, baik itu elit ekonomi, elit politik, maupun kelompok ideologis.

5. Dengan lingkungan budaya pendidikan seperti ini, maka lembaga pendidikan lebih banyak melakukan proses *domestifikasi*, *stupidifikasi* dibandingkan dengan proses pencerdasan dan pemberdayaan anak bangsa. Dalam lembaga pendidikan sudah hidup secara kental, sebuah *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) yang bernuansa ideologis, dan *hegemonik* dari sistem kekuasaan tertentu. Sebut sajalah, perpeloncoan kepada junior adalah (salah satu) *hidden curriculum* dalam sebuah sistem pendidikan yang dilanggengkan oleh komunitas pendidikan itu sendiri.

Wallahu A'lam Bi Ashawaab

DAFTAR PUSTAKA

- Kautsar Azhari Nor (2000), "Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama" dalam Th. Sumarthana (ed) *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin Abdullah (2002), *Pengajaran Kalam dan Teologi dalam Era Kemajemukan di Indonesia: Sebuah tinjauan Materi dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratno Lukito (2002), "Undang-Undang Agama dan Civic Education" dalam *Kompas*, Jum'at 22 Agustus.
- H.A.R Tilaar (2003) *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesia-Tera.
- Fathimah Hussein, Disertasi pada Monash University Australia.